

## IKTHISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022. Laporan ini memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, selain itu juga menjelaskan upaya – upaya perbaikan kinerja agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan sekaligus sebagai bentuk evaluasi diri terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun anggaran 2022 serta perbaikan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan langkah ini Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek – praktek penyelenggaraan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan public. Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program/kegiatan tahunan Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya yang akan menjadi input perbaikan dan penyempurnaan guna pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Tahun 2022 merupakan tahun Perencanaan Strategis yang kedua dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka yang berkomitmen dalam mendukung dan mewujudkan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Malaka yaitu ***“Meletakkan Fondasi yang kokoh dan dinamis untuk mencapai masyarakat Malaka yang Sejahtera ”*** dengan misi pembangunan Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 sebagai upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi, dimana pada tahun 2022 lalu telah terwujudnya program kegiatan melalui beberapa aspek antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia meliputi :
  - a) SDM Aparatur : Aspek jumlah, Jenis, kualitas/kapasitas dan persebarannya.
  - b) Masyarakat : Aspek kualitas
2. Mengoptimalkan potensi daerah;
3. Meningkatkan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat malaka melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis keluarga.
5. Menyusun Tata Ruang

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka dalam penyusunan program dan strategis pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada Misi Bupati dan Wakil Bupati Malaka yaitu Misi Pertama “Meningkatkan Sumber Daya Manusia” meliputi : SDM Aparatur : Aspek jumlah, Jenis, kualitas/kapasitas dan persebarannya dan SDM Masyarakat : Aspek kualitas dan Misi keempat yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat malaka melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis keluarga”.

Dari kedua Misi tersebut memberikan makna sebagai tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat yaitu :

- a. Kualitas SDM baik aparatur maupun masyarakat terhadap usaha industri, perkoperasian dan wira usaha baik usaha mikro, kecil dan menengah perlu di berikan dan ditingkatkan;
- b. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat;
- c. Membuka dan memperluas kesempatan kerja;
- d. Dapat menekan kemelaratan dan kemiskinan.
- e. Kesejahteraan masyarakat pasti terwujud.

Maka dalam rangka meningkatkan aktifitas ekonomi dan kualitas kelembagaan Industri, UMKM dan Koperasi melalui Visi Dinas yaitu ***“Menjadikan Industri, Koperasi dan UMKM sebagai fondasi yang kokoh dalam mencapai masyarakat yang sejahtera”***.Visi tersebut mempunyai makna Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ingin mewujudkan Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi basis dan dasar pijak dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Malaka sehingga industry, koperasi dan UMKM tidak hanya bersaing pada tataran kedaerahan tetapi juga dapat pula eksistensinya pada level regional maupun juga pada level nasional bahkan internasional. Selain itu mengingat bahwa industry, koperasi dan UMKM merupakan basis ekonomi kerakyatan, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan peran sertanya dalam perekonomian di Kabupaten Malaka dengan mendorong peningkatan kemandirian dan daya saing. Dengan ini diharapkan para pelaku usaha Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mampu bertahan dan berkompetisi dan bersaing yang sehat dalam kancah perdagangan bebas baik lokal, regional maupun internasional.

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan OPD yang terbentuk dengan menetapkan 18 (delapan belas) sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 – 2026 yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang efektif dan efisien;
2. Tersedianya Sarana dan Pra Sarana yang menunjang pelaksanaan tugas;
3. Optimalisasi pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam SDA;
4. Meningkatkan kualitas industri;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan kelompok;
6. Meningkatkan Ketranmpilan Usaha Industri;
7. Pendataan dan Pemukthakiran Data;
8. Pemetaan Daerah Sentra Industri;
9. Meningkatnya sarana dan prasarana industri;
10. Tersediannya akses informasi dan akses industri;
11. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada pengawas dan pengurus koperasi tentang penyusunan laporan dan pembukuan;

12. Meningkatkan kualitas koperasi melalui pembinaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi;
13. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
14. Melakukan fasilitasi, pelatihan, dan promosi hasil UMKM;
15. Memfasilitasi pengelolaan, permasalahan, kemudahan pengembangan UMKM;
16. Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dana pinjaman pemerintah;
17. Meningkatkan sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penghargaan usaha koperasi;
18. Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro, PKL dan Asongan.

Sedangkan pada Tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) buah sasaran yang diwujudkan yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum perangkat Daerah yang efektif dan efisien;
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana serta jasa dalam menunjang pelaksanaan tugas;
4. Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
5. Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota;
6. Terlaksananya pemberdayaan kelompok usaha mikro kecil dan menengah melalui pendataan dan pengembangan usaha mikro;
7. Terlaksananya evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota;

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari 7 sasaran di atas adalah sebesar 91,84% hasil ini mencerminkan kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka selama tahun 2022. Pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui 7 program dan 18 kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, tingkat pencapaian kinerja mencapai 71,67%. Keberhasilan ini tercermin dari pencapaian indikator sasaran rata-rata sebesar 71,67% yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan;
- Sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang efektif dan efisien mencapai 100 % Keberhasilan ini tercermin dari pencapaian indikator sasaran sebesar 100% yang dilaksanakan melalui 7(tujuh) kegiatan;
- Sasaran 3 Tersedianya Sarana dan Prasarana serta jasa dalam menunjang pelaksanaan tugas, tingkat pencapaian kinerja mencapai 98,79% keberhasilan ini tercermin dari pencapaian indikator sasaran sebesar 98,79% yang dilaksanakan melalui 3 (tiga);
- Sasaran 4 Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, tingkat pencapaian kinerja mencapai 97,09% keberhasilan ini tercermin dari pencapaian indikator sasaran sebesar 97,09% yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan;
- Sasaran 5 Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota, tingkat pencapaian kinerja mencapai 100% keberhasilan ini tercermin dari pencapaian indikator sasaran sebesar 100% yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan;

- Sasaran 6 Terlaksananya pemberdayaan kelompok usaha mikro kecil dan menengah melalui pendataan dan pengembangan usaha mikro, tingkat pencapaian kinerja mencapai 99,15% keberhasilan ini tercermin dari pencapaian indikator sasaran sebesar 99,15% yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan
- Sasaran 7 Terlaksananya evaluasi Rencana pembangunan industri kabupaten/kota, tingkat pencapaian kinerja mencapai 98,29% keberhasilan ini tercermin dari pencapaian indikator sasaran sebesar 98,29% yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan;

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka Tahun 2022 ini disusun sesuai pedoman sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan berikut:

1. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/X/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara sistematis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan alat evaluasi penilaian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut mengacu pada perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategik (Kebijakan dan Program). Perencanaan jangka menengah dikenal sebagai Rencana Strategik (Renstra). Pelaksanaan tugas tahun 2022 mengacu pada rencana jangka pendek yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan penetapan kinerja sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Strategik (Renstra).

Untuk merealisasi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka, maka telah ditetapkan rencana strategik tahun 2016 – 2022 yang menggambarkan visi Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka, yakni ***“Menjadikan Industri, Koperasi dan UMKM sebagai fondasi yang kokoh dalam mencapai masyarakat yang sejahtera”***

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka terdapat pula berbagai kendala dan hambatan seperti jumlah personil, disiplin kerja dan etos kerja serta pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi aparatur juga anggaran yang mencakup semua kegiatan Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka yang masih kurang.

Oleh karena itu langkah-langkah antisipatif untuk meningkatkan kinerja aparatur sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka perlu kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dan pembebanan tugas ganda bagi aparatur yang dianggap cakap dan mampu tanpa mengabaikan tugas pokok yang diembannya.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MALAKA**

##### **1.1. Kedudukan**

Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malaka, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka dan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka, serta didukung oleh 7 (tujuh) Pejabat Struktural dan 4 pelaksana Yaitu :

a. Eselon II/b	=	1 Orang
b. Eselon III/a	=	1 Orang
c. Eselon III/b	=	3 Orang
d. Eselon IV/a	=	2 Orang
e. Pelaksana	=	4 Orang
Jumlah	=	11 Orang

##### **1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka dan Peraturan Bupati Malaka Nomor 74 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang berikan kepada pemerintah daerah, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

#### **2. LINGKUNGAN STRATEGIS**

Selain struktur organisasi perlu didukung pula faktor-faktor lingkungan strategis yang turut menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka antara lain:

##### **2.1. Kondisi Wilayah Kabupaten Malaka**

### 2.1.1. Geografi

Posisi Geografis Kabupaten Malaka di daratan Pulau Timor Provinsi NTT adalah di bagian paling selatan dan berbatasan langsung darat dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Kecamatan yang berbatasan darat adalah Kecamatan Kobalima Timur dengan desanya yang berbatasan darat dengan RDTL adalah Desa Alas Utara, Alas, Kota Biru dan Alas Selatan. Kecamatan yang berbatasan dengan laut adalah Kecamatan Kobalima Timur, Kobalima, Malaka Tengah, Malaka Barat dan Wewiku. Secara astronomi, wilayah Kabupaten Malaka terletak antara koordinat : 9° 16' 0" LS s/d 9° 48' 0" LS dan 124° 36' 0" BT s/d 125° 12' 0" BT. Kabupaten Malaka dimekarkan dari Kabupaten Belu sesuai UU Nomor 3 Tahun 2013 dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Lawalutolus dan Desa Nanaenoe Kecamatan Nanaet Duabesi; Desa Faturika, Desa Renrua, Desa Teun, Desa Mandeu Raimanus, dan Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- b. Timur berbatasan dengan Negara RDTL;
- c. Selatan berbatasan dengan Laut Timor; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Teba Timur, Desa Oerinbesi, Desa Oekopa, dan Desa Teba, Kecamatan Biboki Tan Pah; Desa Nansean, Desa Susulaku B, Desa Loeram, Desa Oenbit, dan Kelurahan Ainiut Kecamatan Insana; Desa Maurisu Selatan Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) ; Desa Koloto, Desa Lotas, Desa Benahe, Desa Obaki, Desa Sapnala, dan Desa Niti Kecamatan Kokbaun; Desa Besnam dan Desa Nunfutu Kecamatan Fatukopa; Desa Bokong, Desa Tuataun, Desa Toianas, Desa Skinu, dan Desa Lobus Kecamatan Toianas; Desa Meusin Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

### 2.1.2. Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Malaka bervariasi antara ketinggian 0 sampai dengan  $\pm 1500$  m dpl (meter di atas permukaan laut).

Variasi ketinggian (0-150 m. dpl) didominasi wilayah Kecamatan Kobalima, Malaka Tengah, Malaka Barat dan Wewiku.

Sebagian Wilayah Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Weliman dan sebagian wilayah Kecamatan Malaka Tengah merupakan wilayah DAS Benenai yang menerima banjir bandang setiap tahun.

Zone-zone dataran rendah di bagian selatan sebagian besar digunakan sebagai areal pertanian dan kawasan cagar alam dan hutan mangrove sepanjang pantai Selatan.

Sementara pada bagian tengah wilayah Kabupaten Malaka terdiri dari area dengan dataran sedang (200-500 m.dpl). Kecamatan yang berada wilayah tengah (Dataran tinggi) meliputi : Kecamatan Rinhat, Io Kufeu, Botin Leobebe, Sasitamean, Laenmane, Malaka Timur, Kobalima Timur dan sebagian wilayah Kecamatan Wewiku, Weliman, Malaka Tengah, dan Kobalima.

Garis Pantai di Kabupaten Malaka sepanjang 82,94 Km yang membentang dari Kecamatan Kobalima Timur sampai Kecamatan Wewiku meliputi 5 Kecamatan yang berbatasan dengan laut dan terdapat 25 desa pesisir dengan yang dirinci seperti di bawah ini:

Tabel 1. Kecamatan dan Desa Pesisir di Kabupaten Malaka

No	Kecamatan	Jmlh pesisir	Desa Nama Desa Pesisir
1	Malaka Barat	6	Motaain, Fafoe, Umatoos, Rabasa Haerain, Rabasa Hain dan Rabasa.
2	Wewiku	6	Halibasar, Alkani, Lamea, Badarai, Weseben, Lorotolus.
3	Malaka Tengah	7	Kletek, Suai, Railor Tahak, Fahiluka, Lawalu, Harekaka.
4	Kobalima	5	Rainawe, Litamali, Lakekun Utara, Lakekun, Lakekun Barat.
5	Kobalima Timur	1	Alas Selatan
Jumlah		25 desa	-

1. Iklim

Secara umum Kabupaten Malaka beriklim tropis, dengan musim hujan yang sangat pendek (Desember – Maret) dan musim kemarau yang panjang (April – Nopember).

Adapun curah hujan rata-rata per kecamatan di Kab. Malaka sebagai berikut :

- <1000 mm/tahun meliputi sebagian Wilayah Kecamatan Kobalima.
- Antara 1000 – 1500 mm/tahun meliputi wilayah kecamatan Malaka Barat, Malaka Tengah, Malaka Timur, Sasitamean, dan sebagian wilayah Kec. Kobalima.
- Antara 1500 – 2000 mm/tahun meliputi wilayah kecamatan Rinhat.

2. Kondisi Tanah

Jenis dan tekstur tanah di Kabupaten Malaka berkisar lempung berpasir sampai liat dimana tanah liat yang dijadikan sebagai kerajinan gerabah cukup tersebar luas hampir di semua desa di Kabupaten Malaka, namun yang baru diusahakan dan dikomersialisasikan baru dua desa yaitu desa Rabasa Kecamatan Wewiku dan Desa Wemeda Kecamatan Malaka Timur.

a. Potensi Usaha

Potensi usaha di kabupaten Malaka baik usaha kecil dan menengah maupun Industri kecil dan menengah sangat berpotensi dan berpeluang dalam peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat malaka, dimana berdasarkan hasil pendataan sejak tahun 2017-2021 terdapat begitu banyak keberagaman usaha dan industri kecil yaitu sebanyak 61.288 usaha yang terdiri dari usaha kecil dan menengah seperti kios sembako, kios pon, pertamini, perbengkelan, usaha kerajinan besi/logam, usaha peternakan (ternak sapi, paronisasi, ternak ayam potong, ayang petelur, ayam super, ternak babi, ternak kambing, ternak itik/bebek), perikanan (darat dan laut), perkebunan, (kemiri, jambu mete), dan usaha



produksi dan kerajinan seperti kerajinan Tenun ikat, kerajinan Gerabah, Kerajinan Anyaman, meubelair, kerajinan makanan ringan/cemilan, pengolahan aneka produk dari daun kelor, VCO dan kerajinan lain-lain yang menjadi keunggulan dan potensi daerah.

Kerajinan-kerajinan diatas dilakukan berdasarkan potensi yang ada di msyarakat dimana :

1. Kerajinan tenun ikat merupakan kebiasaan turun temurun yang menghasilkan kain adat yang dipakai pada acara-acara adat baik suka maupun duka.
2. Kerajinan gerabah juga merupakan kerajinan yang dilakukan sejak nenek moyang dimana sejak dulu nenek moyang sudah membuat tempayan, periuk, piring dan alat makan lainnya, namun produk ini semakin hari semakin berkurang bahkan nyaris musnah, karena dengan seiring berjalannya waktu peralatan makan dan dapur telah diganti dengan bahan dari besi, aluminium dan plastik, sehingga peralatan dari tanah liat sudah tidak digunakan lagi, namun seiring waktu berjalan pula permintaan pasar untuk gerabah sangat tinggi, maka dengan potensi yang ada perlu menanggapi hal tersebut dan perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan kerajinan gerabah. Sedangkan potensi yang menjadi pendukung utama dari pengembangan kerajinan ini adalah tanah liat yang cocok untuk pembuatan gerabah tersebar hampir di 127 desa di Kabupaten Malaka. Kerajinan Gerabah asal Kabupaten Malaka juga sudah cukup dikenal baik didalam negeri maupun manca negara dan sudah menjadi penghuni museum internasional di Jerman dan di Australia.
3. Kerajinan anyaman lontar merupakan kerajinan turun temurun yang patut dilestarikan karena wilayah Kabupaten Malaka mempunyai potensi tanaman lontar yang cukup banyak, dan kerajinan ini perlu dilestarikan dan perlu pula meningkatkan kualitas dan corak ragamnya.
4. Meubelair merupakan kerajinan kebutuhan rumah tangga yang sangat tinggi, dimana Kabupaten Malaka mempunyai hasil hutan berupa pohon jati, mahoni, jambu air, cemara dan lain-lain yang dapat mendukung produksi kerajinan meubelair tersebut.
5. Pengolahan Daun Kelor dengan berbagai macam jenis olahannya.
6. Kerajinan lain seperti cemilan, makanan ringan dan lain-lain perlu ditingkatkan dan dilestarikan karena potensi pendukung sangat banyak.

b. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka mempunyai 14 (Empat belas) orang personil yang terdiri dari :

- 1) 7 Orang Pejabat Struktural
- 2) 4 Orang PNS Tenaga Pelaksana
- 3) 3 Orang Tenaga Kontrak Daerah

**C. TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara politik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/8/Y/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan membangun secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka.

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka selama tahun 2022. Capaian kinerja 2022 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang disusun pada awal tahun anggaran.

Rencana Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka tahun 2022 merupakan jabaran dari rencana Strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka tahun 2021 - 2026. Indikator yang ditetapkan atas Rencana Kinerja sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

**BAB II**  
**RENCANA STRATEGIS**

**A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI**

**1. Pernyataan Visi**

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Malaka tahun 2021 - 2026, maka disusunlah rencana strategis di tingkat Organisasi Peringkat Daerah. Didalamnya ditetapkan pula visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun tersebut dan relevan dengan visi misi Pemerintahan Kabupaten Malaka. Kerangka rumusan visi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka dimulai dengan mengidentifikasi visi Kabupaten Malaka beserta Misinya, selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan dan isu strategis koperasi. Berdasarkan bagian hal tersebut selanjutnya dirumuskan visi Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka. Gambar 2.1. Rumusan Visi Dan Misi Dinas Perindustrian, Koperasi Dan Ukm Kabupaten Malaka



Sesuai dengan gambar diatas, perumusan visi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021 - 2026 didasarkan pada visi Bupati Malaka dalam RPJMD periode yang sama. Selain itu, visi disusun berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, visi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka yaitu ***“Menjadikan Industri, Koperasi dan UMKM sebagai fondasi yang kokoh dalam mencapai masyarakat yang sejahtera”*** visi tersebut mempunyai makna Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ingin mewujudkan Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi basis dan dasar pijak dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Malaka sehingga industri, koperasi dan UMKM tidak hanya bersaing pada tataran kedaerahan tetapi juga dapat pula eksistensinya pada level regional maupun juga pada level nasional. Selain itu, mengingat bahwa Industri, Koperasi dan

UMKM merupakan basis ekonomi kerakyatan, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan peran sertanya dalam perekonomian di Kabupaten Malaka.

Pernyataan Misi

Misi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Malaka pada tahun 2021 - 2026 yang dirumuskan dalam usaha mencapai Visi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Tata kelola Industri dan Koperasi secara berkelanjutan;
- b. Meningkatkan Kinerja UKM dalam aktivitas ekonomi;
- c. Meningkatkan Kinerja Industri dalam aktivitas ekonomi;
- d. Meningkatkan daya saing koperasi, UKM dan industry;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Koperasi, UKM dan Industri yang berkualitas.

❖ Penjelasan makna Misi

Makna dari Misi mengandung maksud bahwa Aparat Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka dituntut untuk bekerja secara profesional dan mandiri dan mampu melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dalam meningkatkan dan memajukan usaha industri, koperasi dan UKM yang berkualitas dan dapat bersaing di pasaran lokal, regional dan nasional bahkan sampai tingkat internasional.

2. Faktor penentu keberhasilan

Pengidentifikasian faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diidentifikasi antara lain:

- Terciptanya kualitas Industri dan UKM yang berdaya saing;
- Meningkatnya Sumber Daya Manusia Koperasi, Industri dan UKM yang berkualitas;
- Meningkatnya Kemandirian dalam usaha koperasi, industri dan UKM

3. Tujuan dan Sasaran

Dari visi dan misi yang ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara, sebelum tercapainya Visi dan Misi.

Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka adalah sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran
-----	--------	---------

1.	Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam	Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil dan menengah
2.	Peningkatan kualitas usaha industri	Pembenahan, pembinaan dan pengembangan usaha industri
3.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kelompok	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaan industri kecil dan menengah
4.	Peningkatan ketrampilan usaha industri kerajinan	Pelatihan dan bagang bagi kelompok industri
5.	Pendataan dan pemutakhiran data industri	Penataan usaha industri
6.	Pemetaan daerah sentra industri	Pembuatan peta pengembangan industri
7.	Meningkatnya sarana dan Prasarana industri.	Tersedianya sarana dan prasarana IKM
8.	Tersedianya akses informasi dan akses industri	Pengembangan sarana transportasi dan informasi menuju lokasi sentra industri
9.	Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pengawas dan pengurus koperasi tentang penyusunan laporan dan pembukuan	Sumber Daya pengurus dan pengawas koperasi
10	Memberikan Pembinaan, pengawasan dan penilaian kesehatan kepada koperasi	Revitalisasi Manajemen dan kepengurusan koperasi
11.	Menciptakan iklim usaha yg kondusif	Data yang akurat, regulasi, legalitas serta kualitas SDM dan Usaha.
12.	Melakukan fasilitasi, pelatihan, dan promosi hasil UKM.	Peningkatan mitra usaha, pelatihan, dan promosi usaha
13.	Memfasilitasi pengelolaan, permasalahan, kemudahan dan pengembangan UKM	Menumbuhkembangkan kepercayaan diri pada UKM untuk berkembang
14.	Melakukan pemantauan terhadap pengelola dana pinjaman pemerintah	Pengelola usaha yang mampu bertanggungjawab
15.	Meningkatkan sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penghargaan usaha koperasi	Koperasi dan usaha kecil dan menengah
16.	Fasilitasi pengembangan Usaha mikro, PKL dan Asongan	Penataan Usaha mikro dan PKL serta asongan

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Untuk Rencana kinerja tahun 2023 dengan merujuk pada Visi Pemerintah Kabupaten Malaka periode 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malaka yang sejahtera, Berbudaya, dan Berdaya Saing”. Pernyataan visi di atas memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan. Maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan swasembada pangan;
2. Memperkokoh adat istiadat, seni budaya, olahraga dan kerukunan kehidupan beragama;
3. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, kompeten dan berdaya saing global;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
5. Mewujudkan infrastruktur publik yang memadai;
6. Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan kejadian luar biasa.

Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka yakni melaksanakan, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah daerah dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf dinas dalam penyusunan program dan strategis pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang mampu memberi kontribusi nyata dalam mewujudkan sasaran pembangunan ekonomi melalui misi ketiga yaitu: menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, kompeten dan berdaya saing global, dan Misi ke empat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta misi ke lima yaitu Mewujudkan infrastruktur publik yang memadai.

Dari misi tersebut dapat memberikan makna sebagai kontribusi nyata tercapainya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, manajemen birokrasi pemerintahan secara profesional, serta kesiapan infrastruktur dalam menjamin keefektifan dan keefisienan usaha masyarakat dalam meningkatkan ekonomi:

- a. Kualitas SDM baik aparatur maupun pelaku usaha industri, perkoperasian dan wirausaha baik usaha mikro, kecil dan menengah perlu ditingkatkan (*upgrade*) agar adaptif terhadap perkembangan era revolusi industri;
- b. Pengelolaan/ manajemen birokrasi secara profesional agar tercipta pelayanan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
- c. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat;
- d. Penciptaan fasilitas-fasilitas dan sarana prasarana dalam menunjang usaha industri, koperasi, dan UKM masyarakat;

e. Membuka dan memperluas kesempatan kerja;

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
  01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.1.000.001.118,-
  02. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp.142.800.000.-
2. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah :
  01. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebesar Rp.2.175.000,-
  04. Penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp.15.067.650,-
  05. Penyediaan barang cetak dan penggandaan sebesar Rp.9.703.730,-
  09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp.95.812.000,-
3. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
  06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 34.800.000,-
4. Program Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah :
  01. Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat sebesar Rp. 5.475.000,-;
  02. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Rp. 12.000.000,-
5. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
  02. Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan sebesar Rp.70.000.000,-
  06. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp.3.000.000,-
  09. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebesar Rp.1.000.010,-
6. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi :
  02. Pemeriksaan kepatutan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten / kota. Sebesar Rp.99.975.000,-
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) :
  01. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro sebesar Rp.99.975.000,-
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri :
  03. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri sebesar Rp.251.648.000,-
  05. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat Rp.97.450.000-

## **C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022**

1. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;		
	*	Indikator Kinerja Out Put	: Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN
	*	Indikator Out Come	: Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi ASN
	*	Anggaran	: Rp. 1.093.837.013,-
1.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ;		
	*	Indikator Kinerja Out Put	: Tersedianya Administrasi pelaksanaan tugas bagi ASN
	*	Indikator Out Come	: Terbayarnya honor pelaksana tugas administrasi bagi ASN
	*	Anggaran	: Rp. 107.992.000,-

2. Program Umum Perangkat Daerah

2.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;		
	*	Indikator Kinerja Out Put	: Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	*	Indikator Out Come	: Tersedianya penerangan di dalam dan di luar kantor
	*	Anggaran	: Rp. 2.497.550
2.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor :		
	*	Indikator Kinerja Out Put	: Tersedianya bahan logistik kantor
	*	Indikator Out Come	: Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor
	*	Anggaran	: 22.500.000,-
2.3.	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan :		
	*	Indikator Kinerja Out Put	: Terpenuhinya kebutuhan akan bahan-bahan cetakan dan penggandaan
	*	Indikator Out Come	: Menunjang pelayanan administrasi perkantoran
	*	Anggaran	: Rp.6.538.140,-
2.4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	*	Indikator Kinerja Out Put	: Tersedianya dana untuk pelaksanaan Rapat koordinasi dankonsultasi SKPD
	*	Indikator Out Come	: Terwujudnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten malaka
	*	Anggaran	: Rp. 95.944.000,-

3. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat :		
	*	Indikator Kinerja Out Put	: Tersedianya biaya jasa surat menyurat dan benda pos
	*	Indikator Out Come	: Terdistribusinya surat masuk dan surat keluar dinas yang teratur.
	*	Anggaran	: Rp.1.650.000,-

3.2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;		
	*	Indikator Kinerja Out Put	: Terbayarnya tagihan rekening listrik dan telp selama 1 tahun
	*	Indikator Out Come	: Terwujudnya sarana penerangan yang memadai dan tercapainya koordinasi melalui telepon
	*	Anggaran	: Rp. 4.800.000,-

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.	Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau Lapangan :		
	*	Indikator Kinerja Out Put	: Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang layak pakai
	*	Indikator Out Come	: Memperlancar urusan-urusan kedinasan
	*	Anggaran	: Rp. 51.000.000,-
4.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya :		
	*	Indikator Kinerja Out Put	: Terpeliharanya Peralatan Mesin kantor
	*	Indikator Out Come	: Melancarkan urusan administrasi kantor
	*	Anggaran	: Rp.2.250.000,-
4.3.	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya :		
	*	Indikator Kinerja Out Put	: Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan bangunan kantor
	*	Indikator Out Come	: Terciptanya suasana kerja yang aman, nyaman dan tenteram
	*	Anggaran	: Rp.1.496.765,-

5. Program Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5.1.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
	*	Indikator Kinerja Out Put	: Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi
	*	Indikator Out Come	: Tercapainya penilaian kesehatan koperasi
	*	Anggaran	: Rp.34.186.025,-

6. Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan :

6.1.	Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		
	*	Indikator Kinerja Out Put	: Terlaksananya Pendataan potensi dan pengembangan UMKM
	*	Indikator Out Come	: Tersedianya data potensi dan pengembangan UMKM yang terupdate.

	*	Anggaran	:	Rp.33.657.275,-
--	---	----------	---	-----------------

7. Program Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota

7.1.	Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri :			
	*	Indikator Kinerja Out Put	:	Terlaksananya kegiatan pendataan, sinkronisasi struktur industry
	*	Indikator Out Come	:	Tersedianya data sebaran industri yang akurat
	*	Anggaran	:	Rp.999.637.170,-
7.2.	Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta masyarakat :			
	*	Indikator Kinerja Out Put	:	Terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan industry
	*	Indikator ut Come	:	Tersedianya sebaran data potensi industri yang akurat
	*	Anggaran	:	Rp.39.052.275,-

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

#### **A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA**

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (input), Keluaran (output) dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut:

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, materi, alat, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Indikator – indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) yang merupakan gambaran mengenai kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran).

Untuk tahun 2022 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka menetapkan 7 sasaran strategis.

Pada tahun tersebut Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2022.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 91,84%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 7 sasaran yang berhasil mencapai sasaran 91,84%. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran	Nilai Capai Kinerja
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	71,67%.
2.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	100 %
3.	Tersedianya Sarana dan Pra Sarana serta jasa dalam menunjang pelaksanaan tugas	98,79%
4.	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	97,09%
5.	Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	100 %
6.	Terlaksananya pemberdayaan kelompok usaha mikro kecil dan menengah melalui pendataan dan pengembangan usaha mikro	99,15%
7.	Terlaksananya evaluasi Rencana pembangunan industri kabupaten/kota	98,29%

**B. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam tahun 2022 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka menetapkan 6 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017 – 2022. yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Berkembangnya penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif
4. Penataan stuktur industri;
5. Peningkatan kualitas kelembagaan;
6. Berkembangnya ketrampilan usaha industri kerajinan;

Pencapaian 8 sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan yang efektif, efisien dan akuntable;**

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2022		% Pen- capaian target
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1.	Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi ASN	1.093.837.013,-	900.861.349,-	82,35%
2.	Terbayarnya honor pelaksana tugas administrasi	107.992.000,-	107.992.000	100%

**Sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang efektif dan efisien;**

1	2	3	4	5
1.	Tersedianya penerangan di dalam dan di luar kantor	2.497.550,-	2.497.550,-	100%
2.	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	22.500.000,-	22.500.000,-	100%
3.	Menunjang pelayanan administrasi perkantoran	6.538.140,-	6.531,155,-	99%
4.	Terwujudnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupten malaka	95.944.000,-	95.944.000	100%

**Sasaran 3 Tersedianya Sarana dan Pra Sarana serta jasa dalam menunjang pelaksanaan tugas;**

1	2	3	4	5
1.	Terdistribusinya surat masuk dan surat keluar dinas yang teratur.	1.650.000,-	1.631.000,-	95,36%
2.	Terwujudnya sarana penerangan yang memadai dan tercapainya koordinasi melalui telepon	4.800.000,-	4.800.000,-	100%

**Sasaran 4 Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;**

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2022		% Pen- capaian target
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1.	Memperlancar urusan-urusan kedinasan	51.000.000,-	51.000.000	100%
2.	Melancarkan urusan administrasi kantor	2.250.000,-	2.250.000,-	100%
3.	Terciptanya suasana kerja yang aman, nyaman dan tenteram	1.496.765,-	1.496.765,-	100%

**Sasaran 5 Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota;**

1	2	3	4	5
1.	Tercapainya penilaian kesehatan koperasi	34.186.025,-	34.186.025,-	100%

**Sasaran 6 Terlaksananya pemberdayaan kelompok usaha mikro kecil dan menengah melalui pendataan dan pengembangan usaha mikro;**

1	2	3	4	5
1.	Tersedianya data potensi dan pengembangan UMKM yang terupdate.	33.657.275,-	33.657.275,-	100%

**Sasaran 7 Terlaksananya evaluasi Rencana pembangunan industri kabupaten/kota**

1	2	3	4	5
1.	Tersedianya data sebaran industri yang akurat	999.637.170,-	999.637.170,-	100%

2.	Tersedianya sebaran data potensi industri yang akurat	39.052.275,-	39.052.275,-	100%
----	---	--------------	--------------	------

**C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Uraian perbandingan realisasi dan anggarannya, dan atau dengan realisasi tahun lalu. Sumber dana lain penunjang kegiatan (APBD Prop, APBD Kabupaten, APBN, BLN dan lainnya) belum ada.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam Tahun 2022, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malakatelah melaksanakan salah satu kewajiban perundang – undangan yaitu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang menguraikan tentang keberhasilan/ kegagalan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka dalam mengelola sumber daya guna mewujudkan kesejahteraan bagi warganya.

Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka menetapkan 6 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2022 yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Berkembangnya penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif
4. Penataan stuktur industri;
5. Peningkatan kualitas kelembagaan;
6. Berkembangnya ketrampilan usaha industri kerajinan;

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari 8 sasaran adalah sebesar 91,84%, kondisi ini menunjukkan bahwa di samping keberhasilan yang telah diraih,beberapa hal yang berhasil diidentifikasi sebagai penyebab dari belum tercapainya tingkat kinerja yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya gedung Kantor;
2. Kurangnya Aparat ASN, terutama sub bagian perencanaan;
3. Kurang adanya sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara kabupaten, provinsi dan pusat;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malaka disusun dan dikirim sebagai pertanggungjawaban untuk mendapat perhatian yang sepatutnya dan terima kasih.

Betun, 13 Januari 2023

Kepala Dinas PKUKM  
Kabupaten Malaka,

Stefanus Klau, SE  
Pembina Tk.I  
NIP.19660905 200112 1 001



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( L A K I P )**



**DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI  
DAN USAHA KECIL & MENENGAH  
KABUPATEN MALAKA  
TAHUN 2022**